

EKSPLOITASI HUTAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT MELAYU DI SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI, KABUPATEN BATANGHARI DAN MUARO JAMBI TAHUN 2000-2024

Azra Alya Hamdani¹, Agung Prayogo², Aisyah Ika Legita³, Fadhil Hudaya⁴
azralyahmdni@gmail.com¹, agngprygo1976@gmail.com², syaaah050@gmail.com³,
padhilhudaya@unja.ac.id⁴
Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksploitasi hutan di Jambi serta dampaknya terhadap masyarakat Melayu dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pada awalnya, masyarakat Melayu memanfaatkan hutan secara tradisional dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sejak masa kolonial hingga periode modern, eksploitasi hutan mengalami peningkatan melalui kegiatan penebangan kayu, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, serta pembukaan lahan untuk perkebunan. Perubahan ini mendorong transformasi ekonomi masyarakat dari sistem subsisten menjadi lebih berorientasi pasar. Di sisi lain, eksploitasi tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti konflik agraria, kesenjangan sosial, erosi budaya, dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat lokal agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat terjaga.

Kata Kunci: Eksploitasi Hutan, Masyarakat Melayu Jambi, Transformasi Sosial Ekonomi, Lingkungan.

ABSTRACT

This study examines forest exploitation in Jambi and its impacts on the Malay community from economic, social, cultural, and environmental perspectives. Initially, forests were utilized traditionally and sustainably by local communities. However, since the colonial period to modern times, exploitation has intensified through logging, non-timber forest product extraction, and land conversion for plantations. These changes have transformed the economic system from subsistence to market-oriented activities. On the other hand, this exploitation has also led to negative impacts such as agrarian conflicts, social inequality, cultural erosion, and environmental degradation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through literature study. The results indicate the importance of sustainable forest management and community involvement to balance economic interests and environmental conservation.

Keyword: Forest Exploitation, Malay Community, Socio-Economic Transformation, Environment.

PENDAHULUAN

Hutan di Jambi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik sebagai sumber ekonomi maupun sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. Pada masa lalu, masyarakat memanfaatkan hutan secara tradisional dengan tetap menjaga keseimbangan alam melalui kearifan lokal.

Namun, seiring dengan masuknya kekuasaan kolonial dan berkembangnya sistem ekonomi modern, terjadi perubahan besar dalam pemanfaatan hutan. Eksploitasi dilakukan secara lebih intensif melalui penebangan kayu, perdagangan hasil hutan, serta pembukaan lahan untuk perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Perubahan ini membawa dampak yang luas, tidak hanya pada ekonomi masyarakat, tetapi juga pada struktur sosial, budaya, dan lingkungan.

Dalam kondisi saat ini, eksploitasi hutan masih terus berlangsung dan memunculkan berbagai persoalan, seperti konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi hutan serta dampaknya terhadap masyarakat Melayu Jambi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksploitasi Hutan di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Batanghari

a. Eksploitasi pada Masa Kolonial di Kabupaten Batanghari

Eksploitasi hutan di sepanjang Daerah Aliran Sungai Batanghari, terutama di Kabupaten Batanghari, mulai meningkat sejak awal abad ke-20, seiring dengan semakin kuatnya kontrol kolonial Belanda di Karesidenan Jambi. Usai berhasil menaklukkan Kesultanan Jambi pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial merombak cara pengelolaan wilayah, termasuk penguasaan atas sumber daya hutan dan lahan. Dalam situasi ini, hutan tidak lagi dilihat sebagai tempat tinggal bagi masyarakat Melayu dan komunitas adat, tetapi sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pasar global.

Antara tahun 1906 hingga 1942, pemerintah kolonial secara aktif menstimulus pengembangan perkebunan karet sebagai komoditas utama untuk diekspor dari Jambi. Permintaan karet dunia yang semakin meningkat—seiring dengan pertumbuhan industri otomotif di Eropa dan Amerika Serikat—mendorong perluasan perkebunan di bagian pedalaman Sumatra, termasuk di Kabupaten Batanghari. Area hutan di sekitar Muara Bulian dan Bajubang mulai dibuka secara teratur untuk kebutuhan perkebunan karet baik oleh pihak swasta maupun perusahaan Belanda, selain penebangan kayu komersial bernilai tinggi seperti meranti dan tembesu. Pembukaan lahan ini sering kali mengabaikan hak kepemilikan adat serta hak ulayat masyarakat lokal.

Sungai Batanghari berperan sebagai rute utama untuk mendistribusikan hasil hutan dan karet menuju pusat perdagangan di Kota Jambi. Kemudian diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatra menuju pasar internasional. Infrastruktur transportasi sungai ini menjadi pondasi ekonomi kolonial di wilayah tersebut sebelum adanya pengembangan jalur darat dan rel kereta di bagian lain Sumatra. Dengan memanfaatkan jaringan sungai, pemerintah kolonial berhasil mengaitkan kawasan pedalaman Batanghari ke dalam sistem ekonomi global berbasis ekspor.

Pada tahap ini, eksploitasi hutan mengalami perubahan signifikan: dari cara pemanfaatan tradisional masyarakat Melayu yang bersifat subsisten yang termasuk berladang berpindah, mengambil hasil hutan non-kayu, serta menggunakan kayu untuk kebutuhan lokal menjadi sistem ekonomi kolonial yang fokus pada ekspor dan akumulasi kekayaan. Pemerintah kolonial menetapkan regulasi kehutanan dan agraria yang memperkuat kontrol atas tanah dan hutan, serta membatasi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya yang dulunya merupakan bagian dari sistem sosial budaya mereka. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi struktur ekonomi, tetapi juga memicu transformasi sosial, seperti munculnya tenaga kerja kontrak, migrasi penduduk, dan ketimpangan dalam penguasaan lahan yang dampaknya masih dapat dilihat dalam dinamika agraria Batanghari di masa selanjutnya.

b. Ekspansi HPH dan Perkebunan pada Masa Orde Baru

Pada era Orde Baru, penebangan hutan mengalami peningkatan yang signifikan melalui penyerahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di daerah Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Selama rentang waktu dari 1970 hingga 1990-an, perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan melakukan penebangan kayu dalam jumlah besar, terutama jenis meranti dan tembesu. Selain itu, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mulai tumbuh di Kecamatan Sungai Bahar (Muaro Jambi) dan Tungkal Ulu (Tanjung Jabung Barat). Metode eksploitasi pada masa ini terpusat dan berada di bawah kendali negara serta perusahaan-perusahaan besar, sementara masyarakat Melayu lebih banyak berfungsi sebagai tenaga kerja atau petani plasma.

c. Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat Melayu

Perubahan cara pengelolaan hutan telah memberikan efek yang signifikan pada ekonomi masyarakat Melayu di daerah Batanghari dan Muaro Jambi. Pada sebelum tahun 1970-an, ekonomi penduduk di lokasi seperti Bajubang dan sekitarnya di Kabupaten Batanghari, serta Sungai Bahar di Kabupaten Muaro Jambi, sangat bergantung pada sistem subsisten yang cukup mandiri. Mereka memanfaatkan teknik bertani berpindah, berkebun karet secara tradisional, serta mengambil hasil-hasil hutan non-kayu seperti rotan dan damar sebagai sumber kehidupan utama.

Cara hidup ini bukan hanya menggambarkan sebuah sistem ekonomi, tetapi juga menyiratkan cara hidup yang harmonis dengan lingkungan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dengan dimulainya ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit antara tahun 2000 hingga 2020, terjadi perubahan yang nyata. Banyak warga yang sebelumnya bergantung pada pertanian tradisional mulai beralih menjadi pekerja di perusahaan perkebunan atau menjadi petani sawit secara mandiri. Perubahan ini membuat masyarakat semakin terhubung ke dalam sistem ekonomi pasar, di mana pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas di tingkat global.

Di satu sisi, sektor perkebunan memang menciptakan peluang pekerjaan baru di daerah Bajubang (Batanghari) dan Sungai Bahar (Muaro Jambi), tetapi di sisi lain, pembagian manfaat ekonomi sering kali tidak adil. Perusahaan-perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, sementara masyarakat lokal umumnya hanya berposisi sebagai pekerja harian dengan gaji yang rendah atau petani plasma dengan sedikit kekuatan tawar. Ketergantungan yang besar pada satu jenis komoditas, yaitu kelapa sawit, juga menjadikan ekonomi masyarakat menjadi rentan terhadap perubahan harga internasional, terutama selama periode 2014–2018 ketika harga sawit mengalami penurunan dan ketidakstabilan yang cukup besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur ekonomi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan baru berupa ketidaksetaraan dan ketergantungan yang semakin dalam pada pasar global.

2. Konflik Agraria dan Relasi Kekuasaan di Jambi

Konflik lahan di Provinsi Jambi selama dua dekade terakhir sangat terkait dengan perluasan besar-besaran perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, serta kebijakan pelestarian hutan. Perubahan dalam penguasaan lahan ini menimbulkan ketegangan antara penduduk lokal, terutama masyarakat Melayu, dengan perusahaan dan pemerintah. Masalah yang muncul tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas, hak sejarah atas tanah, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara komunitas lokal dan investor besar.

a. Perseteruan Lahan di Kabupaten Batanghari (2011–2015)

Selama tahun 2011 hingga 2015, perseteruan agraria di Kabupaten Batanghari meningkat, khususnya di Kecamatan Muara Bulian dan Bajubang. Masalah ini muncul

akibat tumpang tindih antara lahan adat milik masyarakat Melayu dan Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Untuk warga setempat, lahan bukan hanya merupakan aset ekonomi, tetapi juga bagian dari warisan nenek moyang yang menjadi sumber kehidupan bagi generasi yang akan datang. Ketika perusahaan mendapatkan izin HGU, banyak warga merasa kehilangan akses terhadap kebun karet dan lahan pertanian yang selama ini menopang perekonomian keluarga mereka. Situasi ini memicu aksi protes, mediasi, dan pembicaraan antara masyarakat, pihak perusahaan, dan instansi pemerintah daerah.

Fenomena ini mencerminkan permasalahan klasik agraria di Indonesia, yaitu lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Di Jambi, perkembangan perkebunan sawit sejak adanya otonomi daerah telah mempercepat perubahan dalam struktur kepemilikan lahan dan meningkatkan potensi konflik.

b. Perselisihan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perseteruan agraria juga muncul di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama di Kecamatan Tungkal Ulu dan Merlung selama periode 2013 hingga 2018. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan pengurangan lahan pertanian rakyat serta hutan rawa gambut yang dulunya menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Hutan rawa gambut berfungsi bukan hanya sebagai ruang ekologi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi. Masyarakat memanfaatkannya untuk mencari ikan, mendapatkan hasil hutan non-kayu, dan membuka ladang dengan cara yang terbatas. Ketika perusahaan memperluas konsesi, ruang untuk hidup masyarakat semakin menyusut. Ketidakadilan dalam hubungan kekuasaan pun semakin terlihat: perusahaan memiliki modal, akses politik, dan legitimasi hukum, sementara masyarakat seringkali hanya mengandalkan hak sejarah dan solidaritas sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik agraria biasanya berakar dari ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya serta lemahnya posisi tawar masyarakat lokal dalam struktur ekonomi politik setempat.

c. Ketegangan Akses Hutan di Muaro Jambi dan Merangin

Di Kabupaten Muaro Jambi antara tahun 2010 hingga 2022, ketegangan muncul akibat perluasan hutan tanaman industri dan kebun sawit di daerah Sungai Bahar dan Kumpeh. Daerah ini telah lama menjadi lokasi transmigrasi dan pertanian rakyat. Ketika konsesi HTI dan perkebunan diperluas, terjadi tumpang tindih klaim lahan yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Sementara itu, di Kabupaten Merangin dari tahun 2008 hingga 2016, konflik tersebut memiliki karakter yang berbeda. Penduduk yang tinggal di dekat kawasan taman nasional Kerinci Seblat mengalami pembatasan akses ke hutan akibat kebijakan konservasi. Larangan untuk membuka lahan atau mengambil hasil hutan sering dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga.

Kasus ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak selalu berasal dari ekspansi ekonomi swasta, tetapi juga dapat timbul dari kebijakan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi. Dalam banyak kasus, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial dan sejarah keberadaan masyarakat sekitar hutan.

3. Analisis dan Kondisi Kontemporer Masyarakat Melayu Jambi

a. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Melayu Jambi

Transformasi sosial ekonomi masyarakat Melayu Jambi merupakan proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman, modernisasi, serta masuknya sistem ekonomi pasar. Pada masa lalu, masyarakat Melayu Jambi dikenal sebagai masyarakat yang hidup dengan pola ekonomi

tradisional yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Aktivitas ekonomi utama masyarakat meliputi pertanian, perladangan, perikanan sungai, serta pemanfaatan hasil hutan seperti rotan, kayu, dan hasil hutan non-kayu lainnya. Pola kehidupan ini juga diatur oleh nilai-nilai adat yang kuat serta kearifan lokal dalam memanfaatkan alam secara berkelanjutan.

Namun, seiring dengan berkembangnya pembangunan ekonomi dan masuknya investasi dalam sektor perkebunan, terutama perkebunan karet dan kelapa sawit, terjadi perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Masyarakat. Banyak masyarakat Melayu Jambi yang sebelumnya bekerja sebagai petani tradisional mulai beralih menjadi pekerja perkebunan atau bahkan membuka lahan perkebunan sendiri. Perubahan ini menunjukkan adanya integrasi masyarakat lokal ke dalam sistem ekonomi yang lebih modern dan berorientasi pada pasar.

Selain itu, proses urbanisasi dan perkembangan kota juga memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Melayu Jambi. Banyak masyarakat dari daerah pedesaan yang berpindah ke wilayah perkotaan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, seperti bekerja di sektor perdagangan, jasa, maupun industri kecil. Perubahan ini secara tidak langsung juga memengaruhi pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk perubahan gaya hidup, pola konsumsi, serta cara pandang terhadap nilai-nilai adat dan budaya.

Menurut penelitian yang membahas transformasi budaya Islam Melayu Jambi, modernisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga memengaruhi identitas sosial dan budaya masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya masyarakat Melayu yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi masyarakat yang lebih terbuka terhadap perkembangan sosial dan ekonomi modern. Meskipun demikian, dalam beberapa aspek kehidupan, nilai-nilai adat dan budaya Melayu masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat.

Transformasi sosial ekonomi ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi tidak bersifat statis, tetapi terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Adaptasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti diversifikasi pekerjaan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan dalam aktivitas ekonomi modern.

b. Relasi Kekuasaan, Konflik, dan Respons Masyarakat

Perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jambi juga memunculkan dinamika relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait dengan lahan dan kawasan hutan. Relasi kekuasaan ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat lokal, dan masyarakat adat. Dalam banyak kasus, perbedaan kepentingan antara aktor-aktor tersebut memunculkan konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Provinsi Jambi adalah konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau pihak lain yang memperoleh izin pengelolaan lahan dari pemerintah. Konflik ini biasanya muncul karena adanya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan atau karena masyarakat merasa kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Penelitian mengenai konflik sosial di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap konflik. Hal ini disebabkan oleh luasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sering kali bersinggungan dengan wilayah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat lokal. Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi

stabilitas sosial dan hubungan antar kelompok dalam Masyarakat.

Selain konflik antara masyarakat dan perusahaan, relasi kekuasaan juga terlihat dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam beberapa kasus, kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga internasional dapat membatasi akses masyarakat terhadap hutan. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara upaya pelestarian lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.

Meskipun demikian, masyarakat tidak selalu merespons konflik dengan cara konfrontatif. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan hak mereka, seperti melalui negosiasi, advokasi, maupun kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Strategi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian mengenai politik akses masyarakat adat terhadap sumber daya hutan menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam di Jambi merupakan proses yang dinamis dan terus mengalami perubahan.

c. Kondisi Kontemporer dan Upaya Pelestarian Hutan

Dalam kondisi kontemporer, isu pelestarian hutan menjadi salah satu perhatian utama di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan akibat ekspansi perkebunan, penebangan kayu, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya pelestarian hutan mulai dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah program perhutanan sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara legal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan.

Selain program perhutanan sosial, pengakuan terhadap hutan adat juga menjadi langkah penting dalam pelestarian hutan di Jambi. Pengakuan ini memberikan hak kepada masyarakat adat untuk mengelola wilayah hutan yang secara turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan adanya pengakuan tersebut, masyarakat adat memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan alam.

Beberapa wilayah di Jambi telah menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan, seperti melalui pengelolaan hasil hutan non-kayu, ekowisata, maupun usaha berbasis kehutanan lainnya. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ini juga dapat memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut penelitian mengenai partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya pelestarian

hutan. Ketika masyarakat diberikan hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan, mereka cenderung memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, laporan berita juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat di beberapa wilayah Jambi mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan hutan di masa depan.

KESIMPULAN

Eksplorasi hutan di Jambi telah berlangsung sejak masa kolonial hingga saat ini dengan berbagai bentuk, seperti penebangan kayu, pemanfaatan hasil hutan, dan pembukaan lahan perkebunan. Kegiatan ini telah mendorong perubahan ekonomi masyarakat Melayu dari sistem tradisional menjadi lebih modern dan berorientasi pasar. Namun, selain memberikan manfaat ekonomi, eksploitasi hutan juga menimbulkan dampak negatif seperti konflik sosial, kesenjangan ekonomi, erosi budaya, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Elizabet Sari., Soleh, Ahmad., & Rahayu, Yunie. (2025). Pengaruh konflik terhadap disparitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 13(1), Universitas Muhammadiyah Jambi.
- Suwanti, Yessy. (2022). Persepsi Pemustaka terhadap Implementasi Layanan di UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dengan Metode LibQual. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Hidayat, M., & Supriandi, S. (2024). Dampak Sosial dan Lingkungan dari Eksploitasi Migas dan Tambang Batubara di Jambi. *Jurnal Geosains West Science*.
- Rinjani, A. C., dkk. (2024). Dampak Eksploitasi Hutan terhadap Ekonomi dan Lingkungan. *Indonesian Journal of Economy and Education*.
- Hidayat, M., & Seprina, R. (2022). Jambi masa kolonialisme dan imperialisme sebagai sumber pembelajaran sejarah: Studi kasus perkebunan karet di Batanghari (1906–1942). *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 1(3), 53–64.
- Kalima, Titi, Ratih Damayanti, dan Adi Susilo. 2019. “Rotan Potensial dari Hutan Bukit Lubuk Pekak, Merangin, Jambi.” *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology* 4(1).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2023). *Provinsi Jambi Dalam Angka 2023*. Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- Colombijn, Freek. (2006). *Paco-Paco (Kota) Jambi: Sejarah Sosial Perkotaan di Sumatra*. Yogyakarta: Ombak.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (2014). *Statistik Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
- Effendi, Tenas. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Hidayat, M., & Seprina, R. (2022). “Jambi Masa Kolonialisme dan Imperialisme sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Studi Kasus Perkebunan Karet di Batanghari (1906–1942).” *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, 1(3), 53–64.
- Kalima, Titi, Ratih Damayanti, dan Adi Susilo. (2019). “Rotan Potensial dari Hutan Bukit Lubuk Pekak, Merangin, Jambi.” *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 4(1).
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

- Peluso, Nancy Lee. (2006). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta: Konphalindo.
- Rinjani, A. C., dkk. (2024). "Dampak Eksploitasi Hutan terhadap Ekonomi dan Lingkungan." *Indonesian Journal of Economy and Education*.
- Soemarwoto, Otto. (2001). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Wahyuni, Sri. (2018). "Konflik Agraria dan Perubahan Sosial Masyarakat di Wilayah Perkebunan Sawit Jambi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(2), 145–160.
- Zed, Mestika. (2013). *Sejarah Sosial Ekonomi Jambi 1900–1942*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
- Zuhdi, Susanto. (2018). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afrizal. (2007). *Konflik Agraria dan Resistensi Petani Perkebunan di Sumatera Barat dan Jambi*. Padang: Andalas University Press.